

## **Analisis Pemanfaatan Clinical Pathways Sectio Caesaria di Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Widjayanti, Trisna Budy

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=134427&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi dan klinis dengan pemanfaatan Clinical Pathway (CP) Sectio Caesaria serta outcome klinis serta pembayaran klaim pada pelayanan Ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC). Studi desain Cross Sectional pada unit analisis 1155 data rekam medis ibu melahirkan SC periode 1 Januari 31 Desember 2018 di 3 RS. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan Clinical Pathway Ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari ke 3 RS studi penelitian proporsinya sebesar 43.1% dengan skor dibawah nilai mean 10. RS Pemda memiliki Proporsi tertinggi skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria dibawah nilai mean 10 (76.8%), kemudian diikuti RSP (36.8%). RSNP menunjukkan proporsi (98.1%) skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria diatas dan sama dengan ( $\geq$ ) nilai mean 10. Faktor sosial ekonomi dan klinis ibu melahirkan SC peserta JKN antara lain jenis RS ( $p=0.000$ ), Kelas rawat ( $p=0.014$ ) dan Rujukan ( $p=0.008$ ), jenis SC ( $p=0.005$ ), Usia Ibu ( $p=0.053$ ), Paritas ( $p=0.016$ ), Riwayat ANC ( $p=0.000$ ), Kondisi Panggul ( $p=0.000$ ), kondisi plasenta ( $p=0.001$ ), penyakit penyerta ( $p=0.000$ ) dan riwayat SC ( $p=0.000$ ) menunjukkan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria ( $p<0.05$ ). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta JKN menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan Outcome klinis ( $p=0.002$ ) dan pembayaran klaim ( $p=0.000$ ). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria di RS menunjukkan ketidakseragaman dalam dimensi ICPAT dan tidak melibatkan kondisi pasien dalam penyusunannya. Pemerintah harus membuat payung hukum Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) yang menjadi standar prosedur operasional untuk menyelenggarakan penyelenggaraan program jaminan kesehatan